

BAHAN AJAR



PEREKONOMIAN INDONESIA



Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Editor: Prof. Dr.Rahmatullah, S.Pd., M.E.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Prof. Dr. Rahmatullah, S.Pd. M.E.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 186 uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-182-0

Cetakan Pertama:

April 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bahan ajar dengan judul "Perekonomian Indonesia" dapat diselesaikan. Bahan ajar ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep Perekonomian Indonesia. Di dalam buku ajar ini, kami menyajikan proses pembelajaran yang didukung oleh pendekatan pembelajaran inovatif dengan metode *Case Method dan Project Based Learning*

Pembelajaran melalui studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mendalami konsep-konsep teoritis dalam perekonomian Indonesia dengan menganalisis kasus nyata secara kontekstual dan mendiskusikannya. Buku ajar ini mencakup berbagai topik penting, seperti Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Ekonomi Global, Ketenagakerjaan dan Permasalahan Sosial Ekonomi, Perdagangan International Indonesia, UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, Struktur dan Sektor Perekonomian Indonesia, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial, dan Struktur dan Sektor Perekonomian Indonesia.

Setiap KBM disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut secara mendalam dan menerapkannya dalam konteks nyata. Semoga Buku Ajar ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan membantu dalam memahami lebih dalam tentang konsep Perekonomian Indonesia.

Makassar, 30 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA, UUD 1945, DAN EKONOMI GLOBAL	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perekonomian Indonesia	2
B. Sistem Ekonomi Indonesia	5
C. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila	6
D. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan UUD 1945	8
D. Karakteristik Ekonomi Negara Berkembang	10
E. Posisi Indonesia Dalam Perekonomian Global	14
F. Studi Kasus:	19
Daftar Pustaka	23
BAB 2 KETENAGAKERJAAN DAN PERMASALAHAN SOSIAL EKONOMI	25
A. Struktur Tenaga Kerja Indonesia	26
B. Pengangguran, Setengah Menganggur, dan Sektor Informal ..	29
C. Bonus Demografi dan Kualitas SDM	33
D. Tantangan Kualitas SDM di Indonesia	35
E. Upah Minimum dan Produktivitas Tenaga Kerja	39
F. Hubungan Upah Minimum dan Produktivitas Tenaga Kerja ..	41
G. Mekanisme Transmisi Upah Minimum Ke Produktivitas	42
Daftar Pustaka	45
BAB 3 PERDAGANGAN INTERNATIONAL INDONESIA	47
A. Struktur dan Kinerja Perdagangan Internasional Indonesia	48
B. Dinamika Mitra Dagang dan Kerja Sama Perdagangan Internasional	49
C. Peran Perdagangan Internasional dalam Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan	50

D. Investasi Asing dan Daya Saing Nasional.....	52
E. Daya Tarik Investasi Asing dan Tantangan Struktural Nasional.....	53
F. Investasi Asing dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Nasional.....	54
G. Investasi Asing dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan dan SDGs.....	55
H. Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan.....	56
I. Konsep dan Urgensi Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Nasional.....	57
J. Implementasi Ekonomi Hijau melalui Sektor Strategis.....	59
K. Tantangan dan Strategi Penguatan Ekonomi Hijau Berkelanjutan.....	60
L. Peran Indonesia dalam Pencapaian SDGs	61
M. Integrasi SDGs dalam Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Nasional	62
N. Tantangan dan Strategi Indonesia dalam Mencapai SDGs.....	64
O. Studi Kasus.....	65
Daftar Pustaka.....	69
BAB 4 UMKM DAN EKONOMI KERAKYATAN	72
A. Peran UMKM Dalam Perekonomian Nasional	72
B. Koperasi Dan Ekonomi Kerakyatan.....	78
C. Digitalisasi UMKM.....	82
D. Akses Pembiayaan dan Tantangan Keberlanjutan UMKM	91
Daftar Pustaka.....	95
BAB 5 STRUKTUR DAN SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA.....	97
A. Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier	97
B. Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia.....	102
C. Perubahan Kontribusi Sektor Terhadap PDB.....	113

D. Tantangan Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa	114
Daftar Pustaka.....	122
BAB 6 KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL.....	126
A. Konsep dan Pengukuran Kemiskinan.....	126
B. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	132
C. Program Perlindungan Sosial.....	138
D. Tantangan Pemerataan Pembangunan.....	145
Daftar Pustaka.....	151
BAB 7 STRUKTUR DAN SEKTOR PEREKONOMIAN INDONESIA	155
A. Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier	155
B. Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia.....	160
C. Perubahan Kontribusi Sektor Terhadap PDB.....	171
D. Tantangan Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa	172
DAFTAR PUSTAKA	181
PROFIL PENULIS.....	185

BAB 1

PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA, UUD 1945, DAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian adalah aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan sebuah negara karena berperan langsung dalam menentukan kesejahteraan serta mutu hidup masyarakat. Melalui aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai tentang ekonomi nasional menjadi sangat penting, khususnya bagi generasi muda dan kalangan akademik, agar mampu memahami serta mengkaji dinamika dan perkembangan ekonomi domestik.(Fahlevi, 2022).

Perekonomian Indonesia memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari negara lain, karena dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ekonomi nasional berorientasi pada prinsip kekeluargaan, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Kerangka tersebut dirancang untuk mewujudkan perekonomian yang tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Agustina, 2024). Sebagai negara yang berada dalam

tahap pembangunan, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, mulai dari ketimpangan pendapatan, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga keterbatasan mutu sumber daya manusia. Kondisi tersebut mencerminkan karakteristik umum negara berkembang yang membutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ciri-ciri ekonomi negara berkembang menjadi penting untuk menilai posisi Indonesia dalam rangkaian proses pembangunan ekonomi nasional. (Putri et al., 2025).

Selain itu, seiring dengan semakin pesatnya arus globalisasi, perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan dinamika ekonomi dunia. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi internasional menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran serta posisi yang strategis dalam sistem perekonomian global. Namun demikian, meningkatnya persaingan di tingkat global juga menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonominya agar mampu bertahan serta berkembang di tengah perubahan dan tantangan ekonomi dunia (Prinanda et al., 2025).

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang berfungsi mengatur dan mengoordinasikan beragam kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasional. Berbagai kegiatan ekonomi tersebut melibatkan sejumlah pelaku, antara lain rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta masyarakat internasional, yang saling berinteraksi dan terhubung dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara (Dumairy, 2021). Beberapa pakar ekonomi telah menyampaikan pendapatnya terkait pengertian perekonomian. Chester A. Barnard menjelaskan bahwa perekonomian merupakan suatu sistem organisasi berskala besar yang di dalamnya terjalin hubungan dan kerja sama antara berbagai subjek serta objek ekonomi yang dikelola secara menyeluruh. Sistem ini tersusun atas bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain, meskipun setiap bagian memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Di sisi lain, Dumairy mengemukakan bahwa perekonomian adalah suatu sistem yang berfungsi mengatur serta membina kerja sama dalam bidang ekonomi melalui hubungan antarmanusia dan antarlembaga, yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, ideologi, serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat (Fahlevi, 2022). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia merupakan suatu sistem ekonomi yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem ini tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pada pemerataan hasil pembangunan serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ruang lingkup perekonomian Indonesia meliputi berbagai kegiatan dan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, ruang lingkup perekonomian Indonesia mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut (Agustina, 2024):

1. Kegiatan Produksi

Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Kegiatan produksi menjadi dasar utama dalam perekonomian karena menentukan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Kegiatan Distribusi

Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi yang efektif berperan penting dalam menjaga kelancaran arus barang, menekan kesenjangan wilayah, serta memastikan hasil produksi dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

3. Kegiatan Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan daya beli dan kesejahteraan, serta menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peran penting sebagai penyedia bahan pangan, sumber pendapatan, serta lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya di daerah pedesaan.

5. Sektor Industri

Sektor industri berperan dalam mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Sektor Jasa

Sektor jasa meliputi perdagangan, transportasi, perbankan, telekomunikasi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional.

7. Investasi dan Perdagangan Internasional

Investasi dan perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain.

8. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Penyediaan lapangan kerja yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

9. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam ruang lingkup perekonomian Indonesia, yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor riil. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

B. SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang mengatur hubungan antarpelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda satu sama lain, yang

dipengaruhi oleh ideologi, kondisi sosial dan budaya, serta tujuan pembangunan nasional yang ingin diwujudkan. Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional (Yuanitasari & Suparto, 2020).

Menurut Dumairy, sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan tetap berada di bawah pengawasan negara. Pandangan ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya menganut paham liberal, namun juga tidak bersifat komando, melainkan menekankan keseimbangan antara peran negara dan peran masyarakat (Kristiani, 2025).

Sementara itu, Mubyarto mengemukakan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dipahami sebagai sistem ekonomi yang berjiwa Pancasila, yaitu sistem yang menjadikan nilai moral, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari tingkat pemerataan hasil pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai (Kristiani, 2025).

C. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa menjadi landasan filosofis yang mendasari penyelenggaraan sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila bertumpu pada nilai-nilai luhur bangsa dan menolak dominasi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, kesejahteraan

bersama ditempatkan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan (Yuanitasari & Suparto, 2020).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral dan etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Menurut Boediono, perekonomian yang sehat harus ditopang oleh perilaku ekonomi yang bermoral, jujur, dan bertanggung jawab. Aktivitas ekonomi yang mengabaikan nilai moral berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan sosial, praktik ekonomi yang tidak adil, serta menurunnya tingkat kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa manusia merupakan subjek utama dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sistem perekonomian Indonesia harus mampu menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu, termasuk pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembangunan ekonomi yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan cenderung menghasilkan pertumbuhan yang tidak merata dan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Sila Persatuan Indonesia mengandung pengertian bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada kelompok tertentu dapat memicu kesenjangan sosial dan berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan serta pemerataan pembangunan ekonomi, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam proses

perumusan hingga pengambilan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan secara demokratis. Pemerintah sebagai representasi rakyat berkewajiban menyusun kebijakan ekonomi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta kepentingan nasional dalam jangka panjang, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir dari penerapan sistem ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto, keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan kesempatan berusaha, distribusi pendapatan yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada pada posisi lemah. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila berorientasi pada kesejahteraan bersama dan menolak sistem ekonomi yang hanya berfokus pada akumulasi keuntungan semata (Karimi, 2024).

D. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Selain berpijak pada nilai-nilai Pancasila, sistem perekonomian Indonesia juga memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanudy (2021) menyatakan bahwa pengaturan mengenai sistem ekonomi Indonesia secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang berperan sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sekaligus mencerminkan penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dumairy menjelaskan bahwa asas kekeluargaan mengandung makna adanya semangat gotong royong serta kerja sama antar pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, koperasi dipandang sebagai bentuk badan usaha yang paling sesuai

dengan prinsip tersebut karena mengedepankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan keadilan bagi seluruh anggotanya.

Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah penguasaan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan sektor-sektor vital guna melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat luas. Boediono menegaskan bahwa penguasaan negara terhadap sektor-sektor strategis tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan semata-mata diarahkan untuk memenuhi kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan ideologis.

Dengan demikian, sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu sistem yang berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan,

antara peran negara dan partisipasi masyarakat, serta antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial. Sistem ini diharapkan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Hamid, 2024).

D. KARAKTERISTIK EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang merupakan negara yang masih berada dalam tahap pembangunan dan menghadapi berbagai keterbatasan dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Kondisi tersebut tercermin dari struktur perekonomian yang belum stabil, tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, serta ketergantungan yang cukup besar terhadap faktor eksternal. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama ekonomi negara berkembang. Berikut rincian karakteristik ekonomi negara berkembang (Fahlevi, 2022):

1. Pendapatan Perkapita Rendah

Salah satu ciri utama negara sedang berkembang adalah rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat masih terbatas sehingga daya beli masyarakat juga rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya pendapatan per kapita juga berdampak pada rendahnya tingkat tabungan masyarakat, sehingga akumulasi modal domestik menjadi lemah. Akibatnya, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan dari sumber internal menjadi terbatas dan sering kali harus bergantung pada modal asing atau pinjaman luar

negeri. Kondisi ini memperlambat proses pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketergantungan terhadap pihak eksternal.

2. Ketergantungan pada Sektor Primer

Perekonomian negara sedang berkembang umumnya masih didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor tersebut. Hal ini menjadikan sektor primer sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namun, sektor primer umumnya memiliki produktivitas dan nilai tambah yang rendah, serta sangat bergantung pada kondisi alam dan cuaca. Selain itu, harga komoditas primer cenderung berfluktuasi di pasar internasional. Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer menyebabkan struktur ekonomi kurang beragam dan menghambat proses industrialisasi serta modernisasi ekonomi.

3. Tingkat Pengangguran Tinggi

Negara sedang berkembang juga dicirikan oleh tingginya tingkat pengangguran, baik pengangguran terbuka (Open Unemployment) maupun pengangguran terselubung (Underemployment). Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang cepat tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor formal. Pengangguran terselubung banyak ditemukan di sektor pertanian dan sektor informal, di mana tenaga kerja bekerja di bawah kapasitas optimalnya dengan jam kerja terbatas atau produktivitas rendah. Sementara itu, pengangguran terbuka terjadi ketika individu yang mampu dan ingin bekerja tidak memperoleh pekerjaan karena terbatasnya kesempatan kerja. Kondisi ini menimbulkan berbagai

permasalahan sosial dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur dan Teknologi yang Tertinggal

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi merupakan karakteristik penting negara sedang berkembang. Sarana dan prasarana seperti jalan, transportasi, listrik, air bersih, serta teknologi informasi belum tersedia secara merata dan memadai, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Infrastruktur yang tertinggal menyebabkan tingginya biaya produksi dan distribusi, sehingga mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Selain itu, keterbatasan penguasaan teknologi modern menyebabkan proses produksi masih bersifat tradisional, sehingga produktivitas rendah dan daya saing produk nasional di pasar global menjadi lemah.

5. Pertumbuhan Penduduk Tinggi

Negara sedang berkembang umumnya memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, sementara angka kematian mulai menurun akibat perbaikan layanan kesehatan dasar. Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan jumlah penduduk usia muda dan memperbesar beban tanggungan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, maka pendapatan per kapita akan semakin tertekan. Selain itu, pemerintah menghadapi beban yang lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara sedang berkembang umumnya masih rendah. Rendahnya tingkat

pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat berdampak langsung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Keterbatasan kualitas SDM juga menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi, serta mengurangi kemampuan berinovasi. Akibatnya, negara berkembang sulit bersaing dengan negara maju dalam era globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan.

7. Ketergantungan Ekspor Komoditas

Struktur ekspor negara sedang berkembang umumnya masih didominasi oleh komoditas primer atau bahan mentah, sementara impor lebih banyak berupa barang jadi, teknologi, dan barang modal. Struktur perdagangan seperti ini menyebabkan posisi tawar negara berkembang dalam perdagangan internasional relatif lemah. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas menjadikan perekonomian negara berkembang rentan terhadap fluktuasi harga dunia dan guncangan ekonomi global. Ketika harga komoditas turun, pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun, sehingga stabilitas ekonomi sulit dipertahankan. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, negara berkembang berada dalam tahap transisi pembangunan. Pemerintah umumnya berupaya melakukan pembangunan di berbagai sektor melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, serta penguatan sektor industri dan jasa. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

E. POSISI INDONESIA DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL

Indonesia saat ini menempati posisi yang strategis dalam perekonomian global sebagai salah satu negara berkembang dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), Indonesia berada pada peringkat ke-7 atau ke-8 ekonomi terbesar dunia, menunjukkan besarnya kapasitas produksi dan daya beli domestik. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia diakui oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai global bright spot karena mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten. Kondisi ini didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta peran aktif Indonesia dalam forum internasional seperti G20, yang memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika ekonomi global. Berikut beberapa posisi Indonesia dalam perekonomian global (Prinanda et al., 2025):

1. Peringkat Ekonomi Global

Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia menempati peringkat ke-7 atau ke-8 dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), serta peringkat ke-16 dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal pada tahun 2023 dengan nilai PDB mencapai sekitar US\$1,4 triliun. Pencapaian ini menunjukkan besarnya skala aktivitas ekonomi Indonesia dalam perekonomian global (Setiawan & Lestari, 2022).

Peringkat ekonomi yang tinggi tersebut mencerminkan kuatnya permintaan domestik, besarnya pasar dalam negeri, serta kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap pembentukan PDB nasional. Skala ekonomi yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi investasi asing dan mitra dagang yang

penting bagi banyak negara. Selain itu, posisi ini memberikan Indonesia daya tawar yang lebih kuat dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, baik di bidang perdagangan, investasi, maupun negosiasi ekonomi global. Dengan menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperbaiki posisinya dalam perekonomian dunia serta memperluas pengaruhnya di tingkat internasional (Setiawan & Lestari, 2022).

2. Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Global (Global Bright Spot)

Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat inflasi, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasok internasional, Indonesia sering disebut sebagai salah satu global bright spot atau titik terang perekonomian dunia. Berbagai lembaga internasional, termasuk IMF, menilai Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, bahkan ketika banyak negara lain mengalami perlambatan ekonomi (Prinanda et al., 2025).

Ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik yang menjadi kontributor utama PDB nasional. Konsumsi rumah tangga yang relatif stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga, didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati dan adaptif turut memperkuat stabilitas ekonomi makro. Pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran sistem keuangan. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai

salah satu motor pertumbuhan ekonomi global (Prinanda et al., 2025).

3. Peran Strategis Indonesia dalam Forum G20

Keanggotaan Indonesia dalam forum G20 menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis dalam perekonomian global. G20 merupakan forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan mewakili sebagian besar PDB global. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang tergabung dalam G20, Indonesia memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang (Prasetyo, 2023).

Melalui G20, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis global, seperti pemulihan ekonomi dunia, stabilitas sistem keuangan internasional, reformasi arsitektur keuangan global, serta pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga mendorong terciptanya kerja sama multilateral yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Keterlibatan aktif Indonesia dalam G20 tidak hanya meningkatkan citra dan kredibilitas di mata internasional, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi, investasi, dan transfer teknologi. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi objek globalisasi, tetapi juga berperan sebagai aktor yang turut menentukan arah perekonomian global (Prasetyo, 2023).

4. Ketahanan Ekonomi Eksternal Indonesia

Indonesia menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi eksternal yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Kondisi ini tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang secara konsisten mencatat surplus selama puluhan bulan berturut-turut, didukung oleh performa

ekspor komoditas unggulan. Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia berada pada tingkat yang cukup memadai untuk menopang stabilitas nilai tukar serta memenuhi kebutuhan pembiayaan impor.

Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran yang berhati-hati dengan menjaga defisit fiskal dan rasio utang terhadap produk domestik bruto tetap dalam batas yang terkendali. Kebijakan tersebut berperan penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta meminimalkan risiko kerentanan ekonomi di masa mendatang. Ketahanan eksternal ini memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas, kenaikan suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional. Dengan fondasi ekonomi makro yang relatif stabil, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Liviana et al., 2023).

5. Potensi dan Penggerak Utama Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia ditopang oleh berbagai sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar. Konsumsi domestik berperan sebagai penggerak utama ekonomi nasional, sejalan dengan jumlah penduduk yang besar serta pertumbuhan kelas menengah yang terus meningkat. Kondisi tersebut menjadikan pasar domestik Indonesia sangat menarik bagi pelaku usaha dan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain konsumsi, sektor ekspor komoditas juga masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis di tingkat global.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah serta efisiensi aktivitas ekonomi. Perkembangan sektor digital, perdagangan elektronik, dan pariwisata juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital berperan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Dengan pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada keberlanjutan, sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang (Liviana et al., 2023).

Melalui penerapan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan disertai fokus pada pengembangan sektor industri hilir serta penguatan kerja sama internasional, Indonesia terus berupaya memperkuat dasar perekonomiannya di tingkat global. Kebijakan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga mendorong percepatan industrialisasi, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan daya saing nasional. Di sisi lain, keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum dan kemitraan ekonomi internasional berkontribusi dalam memperluas akses pasar global, meningkatkan aliran investasi, serta mendorong transfer teknologi. Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara berkembang dengan pengaruh yang kian signifikan dalam perekonomian dunia, sekaligus membuka peluang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

F. STUDI KASUS:

Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Ekonomi Global.

Model Pembelajaran

Case study-Based Learning (CBL)

Pendekatan: diskusi kelompok, analisis kebijakan, presentasi, refleksi

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

Mahasiswa/siswa mampu:

1. Menjelaskan karakteristik sistem ekonomi Indonesia.
2. Menganalisis persoalan ekonomi Indonesia dengan perspektif Pancasila & UUD 1945.
3. Mengaitkan dinamika ekonomi nasional dengan ekonomi global.
4. Menyusun solusi argumentatif berbasis konsep ekonomi.

KASUS UTAMA

Kasus 1. Hilirisasi vs Tekanan Global

Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan hilirisasi sumber daya alam (misalnya nikel) untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional. Namun, kebijakan ini memicu gugatan dagang internasional dan tekanan dari negara mitra yang merasa dirugikan.

Fokus Analisis:

1. Prinsip Pasal 33 UUD 1945
2. Keadilan sosial & kepentingan nasional
3. Dampak terhadap investasi & perdagangan global

Pertanyaan Diskusi:

1. Bagaimana kebijakan hilirisasi mencerminkan nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945?
2. Apa manfaat ekonomi domestik dari hilirisasi?

3. Apa risiko dalam hubungan ekonomi global?
4. Strategi apa yang sebaiknya ditempuh Indonesia?

Kasus 2. Ketimpangan & Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil (~5%), tetapi ketimpangan pendapatan dan kesenjangan wilayah masih tinggi.

Fokus Analisis:

1. Trade-off pertumbuhan vs pemerataan
2. Sila Keadilan Sosial
3. Kebijakan fiskal & sosial

Pertanyaan Diskusi:

1. Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi ketimpangan?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Pancasila melihat masalah ini?
3. Kebijakan apa yang relevan?

Kasus 3. Pengangguran Terdidik

Jumlah lulusan perguruan tinggi meningkat, tetapi pengangguran terdidik tetap signifikan.

Fokus Analisis:

- Karakteristik negara berkembang
- Kualitas SDM & mismatch pasar kerja
- Peran pemerintah & sektor swasta

Pertanyaan Diskusi:

1. Faktor penyebab pengangguran terdidik?
2. Dampaknya bagi ekonomi nasional?
3. Solusi kebijakan?

AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pendahuluan (10–15 menit)

1. Apersepsi: tanya jawab tentang isu ekonomi terkini
2. Motivasi: relevansi materi dengan realitas nasional

Kegiatan Inti (60–80 menit)

Langkah CBL:

- a. Orientasi Kasus
Dosen/guru memaparkan kasus (narasi singkat + data pendukung)
- b. Diskusi Kelompok
Mahasiswa/siswa dibagi kelompok, menganalisis kasus dengan panduan pertanyaan
- c. Analisis Konseptual
Kelompok mengaitkan kasus dengan:
 1. Sistem ekonomi Indonesia
 2. Nilai Pancasila
 3. Pasal 33 UUD 1945
 4. Karakteristik negara berkembang
 5. Dampak globalisasi
- d. Presentasi & Debat Mini
Kelompok menyampaikan hasil analisis + solusi

Penutup (10–15 menit)

1. Refleksi kelas
2. Penegasan konsep inti
3. Kesimpulan bersama

TUGAS INDIVIDU

Esai Analitis (500–700 kata):

“Analisislah satu kebijakan ekonomi Indonesia (contoh: subsidi energi, hilirisasi, bansos, UMKM digitalisasi) dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan ekonomi global.”

PENILAIAN

Aspek	Indikator
Pemahaman Konsep	Ketepatan penggunaan teori
Analisis Kasus	Kedalaman & logika argumen
Keterkaitan Perspektif	Pancasila + UUD 1945 + Global
Solusi	Relevan & realistis
Komunikasi	Kejelasan presentasi

VARIASI PENGAYAAN

1. Simulasi sidang kebijakan ekonomi
2. Debat: “Ekonomi pasar vs Ekonomi Pancasila”
3. Analisis berita ekonomi terkini

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. F. (2024). *Pengantar sistem ekonomi Indonesia* (Cetakan Pe). UMSIDA Press (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press).
- Dumairy. (2021). *Perekonomian Indonesia* (Edisi Terb). Erlangga.
- Fahlevi, M. R. (2022). *Buku Ajar Perekonomian di Indonesia* (Cetakan Pe). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hamid, A. (2024). *Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan ekonomi nasional*.
- Karimi, S. (2024). *Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme* Global. 4(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.526>
- Kristiani, B. H. (2025). *PANCASILA ECONOMIC SYSTEM: A MILESTONE IN INDONESIA ' S NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT*. 26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v26i1.6987>
- Liviana, R., Dewantari, A., & Rakhmadi, R. (2023). *Kontribusi Ekonomi Indonesia sebagai Negara Global South di Tingkat Global*. 1, 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13373594>
- Prasetyo, B. (2023). *Indonesia ' s Strategic Engagement in G20 : The Role of Economic Diplomacy in Advancing National Interests and Fostering Inclusive Global Economic Growth*. 11(3), 859–866.
- Prinanda, D., Prasodjo, H., & Pradhesty, R. (2025). *Indonesia and the complex global economic order : Implication of global and regional economic arrangements on Indonesia ' s trade*. 15(1), 127–138.
<https://doi.org/10.12928/optimum.v15i1.12102>

- Putri, R., Hasibuan, N., Paulo, J., Sinaga, N., Sinaga, H. I., Tampubolon, K. R., Sihombing, D., & Triansyah, F. A. (2025). Analisis Kondisi Perekonomian Indonesia 2020-2024 Jenis dan Sumber Data. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(November). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v3i4.2290>
- Setiawan, E., & Lestari, Y. G. (2022). Kekuatan ekonomi Indonesia di tengah kekuatan ekonomi global. *Ekomika Manajemen Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 11 (1).
- Tanudy, A. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia* (Edisi Pert). Widina Bhakti Persada.
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. 4, 36–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>

BAB 2

KETENAGAKERJAAN DAN PERMASALAHAN SOSIAL EKONOMI

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan, serta stabilitas sosial. Di Indonesia, dinamika ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka, dominasi sektor informal, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja (*job mismatch*). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas (Hasibuan & Siagian, 2025).

Permasalahan ketenagakerjaan yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu berbagai masalah sosial ekonomi, antara lain kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Studi Rahmat (2025) menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran berkontribusi signifikan terhadap penurunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja yang tidak inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Selain pengangguran, perubahan struktur ekonomi akibat digitalisasi dan *otomasi* juga turut memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. *Otomasi* di satu sisi mampu

meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja berkeahlian rendah dan menimbulkan pengangguran struktural. Saddiah dan Nasution (2025) menegaskan bahwa transformasi teknologi tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperparah kerentanan sosial ekonomi pekerja.

Masalah ketenagakerjaan juga berkaitan erat dengan kualitas kebijakan publik dan regulasi ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja sepihak, perlindungan tenaga kerja yang lemah, serta ketidakstabilan hubungan *industrial* sering kali memperburuk kondisi sosial ekonomi pekerja dan keluarganya. Alkharomi dan Shalihah (2025) menekankan bahwa lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dapat meningkatkan risiko konflik sosial dan ketidakpastian ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai ketenagakerjaan dan permasalahan sosial ekonomi menjadi sangat penting untuk memahami keterkaitan antara pasar kerja, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Hsb et al., 2025).

A. STRUKTUR TENAGA KERJA INDONESIA

Struktur tenaga kerja Indonesia mencerminkan karakteristik demografis, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Struktur ini penting untuk dianalisis karena menentukan daya saing tenaga kerja nasional dan arah kebijakan ketenagakerjaan. Secara umum, struktur tenaga kerja Indonesia dapat diklasifikasikan

DAFTAR PUSTAKA

- Imbran, H. H. (2022). ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR PEREKONOMIAN SEKTOR PRIMER, . 5(2), 90–102.
- Nanga, M., & Widjaja, W. (2024). Structural Transformation in the Indonesian Economy : Why does ' Financial Development ' Matter ? 19(2), 213–222.
- Rinaldi, N., Erfit, E., & Rosmeli, R. (2022). Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia. 117–126.
- Studi, J., Dan, E., & Jsep, P. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA. 1(2), 37–43.
- Tazkiya, N. H., Baitunnisa, N. C., & Hakam, L. I. (2024). Jurnal Ekonomi : Journal of Economic Peran Transformasi Struktur Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Literatur Sistematis. 2006.
- Tjokorda Gde Agung Friska Adnyana¹, G. K. Gandhiadi², D. P. E. N. (2020). PENERAPAN METODE FUZZY AHP DALAM PENENTUAN. 5(2), 59–66.
- Chakim, M. H. R., & Pusparanti, S. (2022). AKSELERASI BISNIS JASA PASCA COVID-19 DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN. JMARI, 3(2), 159–175. <https://doi.org/10.33050/jmari.v3i2.2420>

- Fisco, Y., Magriasti, L., & Yulhendri, Y. (2025). EFISIENSI ALOKSI SDA EFISIENSI ALOKSI SDA DAN DEGRADASI LINGKUNGAN SERTA AKTIFITAS EKONOMI: EFISIENSI ALOKSI SDA DAN DEGRADASI LINGKUNGAN SERTA AKTIFITAS EKONOMI. *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 15–38. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6338>
- Haviz, M., Suryaman, R., & Tri, R. (2021). Fenomena Alih Fungsi Lahan: Apakah Tenaga Kerja dapat Berpindah dari Sektor Pertanian Ke Sektor Lain ?: Studi Kasus Kabupaten Bekasi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i1.8>
- Islami, M. I., & Hastiadi, F. F. (2020). Nature of Indonesia's Deindustrialization. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), 220–232. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.38016>
- Lestari, I. (2020). Analisis Transisi Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13491>
- Mubarat Apriana Sasmita, Albertus Peter Palit, & Muhammad Yasin. (2023). Konsep Transformasi Struktural Pada Sektor Industri. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 268–273. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1766>
- Palumpun, D. L., Umar, H. B., & Patinggi, P. N. (2017). Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v4i1.2080>

- Satriyani, Y., & Tanur, E. (2023). ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020-2021. *JURNAL EKONOMIKA*, 14(02), 263– 273. <https://doi.org/10.35334/jek.v14i02.3330>
- Setiawan, H. (2018). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI DI INDONESIA DENGAN MODEL STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Sholihah, I. M., Syaparuddin, S., & Nurhayani, N. (2017a). Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3930>
- Sholihah, I. M., Syaparuddin, S., & Nurhayani, N. (2017b). Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3930>
- Tajuddin, T., Syarif, M., Natsir, M., & Nur, S. (2020). DAMPAK TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI INDONESIA TERHADAP MOBILITAS PEKERJA ANTAR SEKTOR. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1). <https://doi.org/10.33772/jpep.v5i1.12555>

Wilson Simorangkir. (2022). ANALISA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI. Jurnal Price : Ekonomi dan Akuntansi, 1(01), 29–35. <https://doi.org/10.58471/jecoa.v1i01.3595>

PROFIL PENULIS



Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Pangkajene, 23 Juni 1981. Merupakan Dosen tetap di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (2003), gelar magister Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (2006), dan gelar Dr. (Doktor) dalam bidang Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia (2016). Tahun 2021 hingga tahun 2025 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Microteaching Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional, dan telah menghasilkan beberapa buku ajar dan buku referensi serta telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Inanna merupakan editor maupun reviewer pada jurnal nasional terakreditasi. Minat kajian utama riset Inanna adalah Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi Informal, kewirausahaan, UMKM, Model-Model Pembelajaran, dan *Education for Sustanaible Development*. Dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), saat ini Inanna terlibat sebagai Dosen pengajar/pembimbing dalam beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, seperti pertukaran mahasiswa, dosen pembimbing lapangan asistensi mengajar berdampak, dosen pembimbing lapangan magang mandiri, asessor rencana

pembelajaran lampau dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Bina Desa.

Email Penulis: inanna@unm.ac.id

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pembelajaran melalui studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mendalami konsep-konsep teoritis dalam perekonomian Indonesia dengan menganalisis kasus nyata secara kontekstual dan mendiskusikannya. Buku ajar ini mencakup berbagai topik penting, seperti Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Ekonomi Global, Ketenagakerjaan dan Permasalahan Sosial Ekonomi, Perdagangan International Indonesia, UMKM dan Ekonomi Kerakyatan, Struktur dan Sektor Perekonomian Indonesia, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial, dan Struktur dan Sektor Perekonomian Indonesia.

Setiap KBM disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep tersebut secara mendalam dan menerapkannya dalam konteks nyata. Semoga Buku Ajar ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan membantu dalam memahami lebih dalam tentang konsep Perekonomian Indonesia.



IKAPI
IKATAN PENGAJAR INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

